BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu dari negara yang sedang berkembang. Sebagai salah satu negara yang berkembang Indonesia melakukan berbagai macam pembangunan dalam segala bidang kehidupan baik pembangunan yang dilakukan di pusat maupun di daerah. Pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk suatu perubahan terhadap keadaan masyarakat yang lebih baik.

Pelaksanaan pembangunan dalam segala tingkatan kehidupan bukan saja membutuhkan dana yang relatif besar tetapi juga membutuhkan aparatur negara untuk mengerjakannya. Dana yang sudah tersedia akan diserahkan kepada aparatur negara yang bersangkutan dan tidak kecil kemungkinan dana tersebut akan diselewengkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Penyelewengan dana tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi.

Pembangunan tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya jika anggaran dana yang dibutuhkan atau dana yang dialokasikan untuk pembangunan tersebut tidak sampai kepada sasarannya dengan tepat. Artinya anggaran tersebut tidak sesuai dengan jumlah awalnya. Jika demikian jelas terlihat bahwa penyimpangan sudah pasti terjadi dalam proses penerapan pembangunan tersebut.

Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Korupsi sangat erat hubungannya dengan kekuasaan.

Karena dengan adanya kekuasaan seseorang akan dengan mudah untuk melakukan tindakan yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan. Tindakan korupsi akan merusak struktur pemerintahan dan menjadi penghambat utama terhadap jalannya pemerintahan yang baik dan pembangunan pada umumnya.

Korupsi terjadi hampir disetiap lapisan masyarakat dengan beragam profesi serta jumlah nilai uang dari yang kecil sampai nilai uang yang besar yang dapat menyebabkan kesengsaraan di tengah-tengah masyarakat. Setiap tahun tingkat pertumbuhan korupsi tidaklah semakin menurun malah semakin meningkat bahkan menjadi suatu budaya di suatu bangsa. Korupsi menjadi suatu hal yang mengganggu kesejahteraan masyarakat karena menimbulkan kerugian bagi negara juga bagi masyarakat.

Berdasarkan indeks persepsi korupsi, Indonesia masih masuk ke dalam jajaran negara-negara terkorup. Menurut survei *Transparency International*, skor IPK Indonesia tahun 2011 adalah 3, hanya beranjak 0,2 dari skor tahun 2010 yaitu 2,8. Perubahan skor 0,2 antara tahun 2010 dan 2011 tidak berarti apa-apa secara metodologi atau dapat dikatakan tidak ada perubahan yang signifikan dalam pemberantasan korupsi. Indonesia menempati peringkat ke 100 dari total 183 negara yang disurvei.

IPK Indonesia secara keseluruhan setiap tahunnya mengalami peningkatan, hal ini membuktikan tingkat pertumbuhan korupsi di Indonesia belum mampu diminimalisir. Hal tersebut membuktikan ada yang salah dengan kinerja aparatur yang berkaitan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Tingkat pertumbuhan korupsi menunjukkan bahwa kinerja aparatur yang bersangkutan dalam pemberantasan korupsi belum maksimal.

Setiap daerah di Indonesia pasti melakukan tindakan yang namanya korupsi. Salah satu kota di Indonesia dan yang menjadi Ibukota Indonesia sekalipun tidak lepas dari korupsi. Kota Jakarta dengan segala potensi yang ada didalamnya bahkan sebagai kota Metropolitan memungkinkan setiap orang, setiap lapisan masyarakat untuk melakukan tindakan korupsi. Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk di Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta membawa masalah bagi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap masyarakat.

Masyarakat yang miskin, tingkat pengangguran yang tinggi, pendidikan yang rendah, tingkat kriminalitas yang tinggi, desakan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, penghasilan yang tidak layak terkadang menuntut mereka untuk melakukan penyimpangan seperti korupsi. Segala cara akan ditempuh demi pemenuhan kebutuhan hidup. Penyebab korupsi lain dapat timbul juga dari sifat tamak seseorang yang tidak puas dengan apa yang sudah dimiliki, keinginan untuk memperkaya diri sendiri akan membuat seseorang untuk melakukan korupsi.

Tindakan korupsi yang terjadi di Ibukota Indonesia tidak sedikit yang merugikan masyarakat, bahkan mengganggu kesejahteraan masyarakat. Para penguasa sibuk memperkaya diri sendiri tanpa mempedulikan nasib kehidupan masyarakat di lingkungan mereka yang berada pada garis kemiskinan. Pemimpin-pemimpin juga wakil-wakil masyarakat yang duduk dalam pemerintahan yang

menyalahgunakan kekuasaan semakin kaya sedangkan masyarakat yang tidak atau kurang beruntung semakin terperosot dalam jurang kemiskinannya.

Tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena tindak pidana korupsi juga dapat merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas suatu bangsa. Hal ini dapat berdampak membudayanya tindak pidana korupsi tersebut. Kasus-kasus korupsi di Provinsi DKI Jakarta juga tidak semakin menurun malah semakin bertambah dari tahun ke tahun. Catatan Komisi Pemberantasan Korupsi hingga akhir 2011 menunjukkan pengaduan masyarakat atas dugaan tindak pidana korupsi di Provinsi DKI Jakarta yang dilaporkan masyarakat mencapai 9,507 pengaduan atau 18,45 persen dari 51.540 pengaduan yang diterima. Berikut adalah kasus-kasus korupsi yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta yang selanjutnya proses hukumnya tidak jelas ataupun yang sedang dalam tahap penyidikan oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi:

Tabel 1.1
Kasus Korupsi Di Provinsi DKI Jakarta

No.	Dugaan Kasus
1.	Kasus korupsi bailout Bank Century
2.	Kasus korupsi terkait penyalahgunaan wewenang di lingkungan Provinsi DKI Jakarta oleh Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo
3.	Kasus dugaan korupsi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) di enam sekolah yang ada di Jakarta.
4.	Kasus korupsi terkait Iklan Layanan Masyarakat PemProv DKI dalam APBD 2006-2007 oleh Herman Felani
5.	Dugaan Korupsi Penjualan Aset PT. PAM Jaya

Sumber : Biro Humas KPK Tahun 2012

Contoh kasus-kasus korupsi diatas hanya sebagian kecil dari kasus-kasus korupsi yang ada di Ibukota. Meningkatnya korupsi di Ibukota tidak lepas dari seiring dengan kemajuan kemakmuran dan teknologi. Pembangunan yang

semakin maju dalam suatu bangsa juga berpengaruh terhadap meningkatnya kebutuhan dan mendorong orang untuk melakukan korupsi. Belum optimalnya pemberantasan korupsi secara efektif dan efisien yang dilaksanakan oleh subsistem utama kita, yaitu kepolisian dan kejaksaan menjadi bahan pertimbangan untuk mendirikan suatu lembaga yang berfungsi untuk memberantas korupsi. Lembaga tersebut adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Adanya lembaga tersebut menjadi harapan bagi masyarakat bahwa setiap korupsi yang terjadi di berbagai sektor dapat diberantas oleh pihak KPK dan meminimalisir tindak pidana korupsi yang terjadi khususnya di Provinsi DKI Jakarta. Besarnya harapan masyarakat tidak sejalan dengan apa yang terjadi dilapangan, korupsi yang terjadi cenderung sangat terorganisir dan terstruktur dengan rapi sehingga menyulitkan petugas terkait untuk menindaklanjutinya.

Berikut adalah data penanganan perkara korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan wilayah.

Tabel 1.2
Jumlah Data Penanganan Perkara Korupsi
Oleh KPK Berdasarkan Wilayah

No	Propinsi	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Jumlah
1	Pemerintah Pusat	1	15	11	12	23	24	20	21	1	**128**
2	NAD	1	1			1					3
3	Sumatera Utara				2			2	1		5
4	Sumatera Selatan						1	1			2
5	Riau dan Kepulauan Riau				3	4	3				10
	Bengkulu								1	2	1
6	DKI Jakarta		1	3		1	1	4	5		15

7	Banten								1		1
8	Jawa Barat		2		1	5	3	7	4		22
9	Jawa Tengah			2	2		1		3		8
10	Jawa Timur					2	2		1		5
11	Lampung							3			3
12	Kalimantan Selatan			1							1
13	Kalimantan Timur			6	3	2					11
14	Sulawesi Utara					1		1	2		4
15	Sulawesi Selatan				1						1
16	NTB			1		2					3
17	Papua					1	2	1			4
18	Malaysia			3		3					6
19	Singapura					2		1			3
	Jumlah	**2**	**19**	**27**	**24**	**47**	**37**	**40**	**39**	**3**	**238**

Sumber : Biro Humas KPK Tahun 2012

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah korupsi di Provinsi DKI Jakarta masih tinggi di banding dengan wilayah lain. Berkembangnya tindak pidana korupsi yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta menuntut para aparatur yang bersangkutan dalam memberantas korupsi untuk mengerahkan setiap kemampuannya demi tercapainya tujuan organisasi yang melembagainya. Faktanya timbul permasalahan yang terjadi saat kasus korupsi dalam proses penyelidikan, usaha para aparatur terlihat lamban dalam proses penyelesaiannya akibat lemahnya penegak hukum.

Anggaran APBD untuk daerah Provinsi DKI Jakarta termasuk besar tetapi masyarakat Provinsi DKI Jakarta tidak menikmati anggaran tersebut. Pertumbuhan ekonomi semakin meningkat dimana masyarakat Provinsi DKI

Jakarta mau tidak mau tetap mengikuti perkembangan tersebut. Masyarakat Provinsi DKI Jakarta tidak berasal dari latar belakang yang sama. Berasal dari beranekaragam latar belakang masyarakat Provinsi DKI Jakarta hidup dalam lingkungan yang tidak menjamin kebutuhan hidup dapat terpenuhi.

Banyak pelaku penyimpangan termasuk para koruptor yang berada di Provinsi DKI Jakarta. Masyarakat berharap Komisi Pemberantasan Korupsi mampu menyelesaikan perkara korupsi khususnya dilingkungan Provinsi DKI Jakarta. Fokus aparatur Komisi Pemberantasan Korupsi di Provinsi DKI Jakarta terkait dengan penyelenggara negara yang ketahuan melakukan tindak pidana korupsi.

Banyaknya pengaduan yang diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tidak semua perkara tersebut yang ditangani. Sebagian perkara tindakan korupsi dilimpahkan kepada pihak penegak hukum yang lain seperti kejaksaan dan kepolisian. Komisi Pemberantasan Korupsi membatasi penanganan kasus korupsi di Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah nominal satu miliar ke atas. Dibawah nominal tersebut merupakan urusan dari kepolisian dan kejaksaan.

Permasalahan lainnya timbul yang mana terkadang para aparatur yang bersangkutan tidak menindaklanjuti perkara kasus korupsi sampai selesai dengan membawa para pelaku ke persidangan. Salah satu contoh kasus aliran dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), ratusan triliun justru tidak muncul ke pengadilan. Melihat hal tersebut masyarakat bertanya-tanya apa sebenarnya yang terjadi terhadap aparatur yang bersangkutan dalam pemberantasan korupsi

tersebut, sehingga gampang saja sebuah kasus korupsi yang parah pelan-pelan hilang dari perbincangan setiap media.

Kinerja lembaga KPK tergantung bagaimana kinerja aparaturnya. Aparatur KPK sebagai alat negara yang berfungsi untuk memberantas korupsi dituntut memiliki kualitas sumber daya manusia (penyidik) yang berkompetensi dalam bidangnya. Kompetensi yang dimiliki oleh setiap aparatur KPK sebenarnya dapat meningkatkan kinerja organisasi. Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **"Kinerja Aparatur Komisi Pemberantasan Korupsi Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kemampuan aparatur KPK di Provinsi DKI Jakarta?
2. Bagaimana motivasi aparatur KPK di Provinsi DKI Jakarta ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja aparatur KPK di Provinsi DKI Jakarta.

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tingkat kemampuan aparatur KPK di Provinsi DKI Jakarta.
2. Untuk mengetahui motivasi aparatur KPK di Provinsi DKI Jakarta.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian memiliki kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis.

Adapun kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Kegunaan bagi peneliti, dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti untuk menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan mengenai kinerja aparatur KPK di Provinsi DKI Jakarta.
2. Kegunaan teoritis, dari hasil peneliatian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pemerintahan serta dapat dijadikan bahan acuan untuk masa yang akan datang bagi yang melaksanakan penelitian mengenai pembahasan kinerja aparatur KPK di Provinsi DKI Jakarta.
3. Kegunaan praktis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan bagi pemerintah, khususnya aparatur di kantor KPK Provinsi DKI Jakarta.